

## Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Anjani<sup>1</sup>, Eka Jumarni Fithri<sup>2</sup>, Selvita Meilansari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya, [anjanipalembang7@gmail.com](mailto:anjanipalembang7@gmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya, [ekajf.2f@polsri.ac.id](mailto:ekajf.2f@polsri.ac.id)

<sup>3</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya, [selvitameilansari@polsri.ac.id](mailto:selvitameilansari@polsri.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini “bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data dokumen yang bersumber dari data sekunder diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan LKPD BPK RI. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh dengan populasi sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan total data sampel yaitu sebanyak 85. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan, belanja modal berpengaruh positif signifikan dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah, belanja modal dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.”

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Opini Audit dan Kinerja Keuangan.

### ABSTRACT

*This study aims “to determine the effect of local revenue, capital expenditure and audit opinion on the financial performance of local governments of regencies/cities in South Sumatra Province in 2019-2023. The type of research used in this study is quantitative research, with document data collection techniques sourced from secondary data obtained from the audit report of the BPK RI LKPD. This study uses a saturated sampling method with a population of 17 regencies/cities in South Sumatra with a total sample data of 85. The results of this study indicate that partially local revenue has a significant negative effect, capital expenditure has a significant positive effect and audit opinion has a significant negative effect on the financial performance of local governments. Simultaneously local revenue, capital expenditure and audit opinion together affect the financial performance of local governments.”.*

**Keywords :** Local Revenue, Capital Expenditure, Audit Opinion, and Financial Performance

### A. PENDAHULUAN

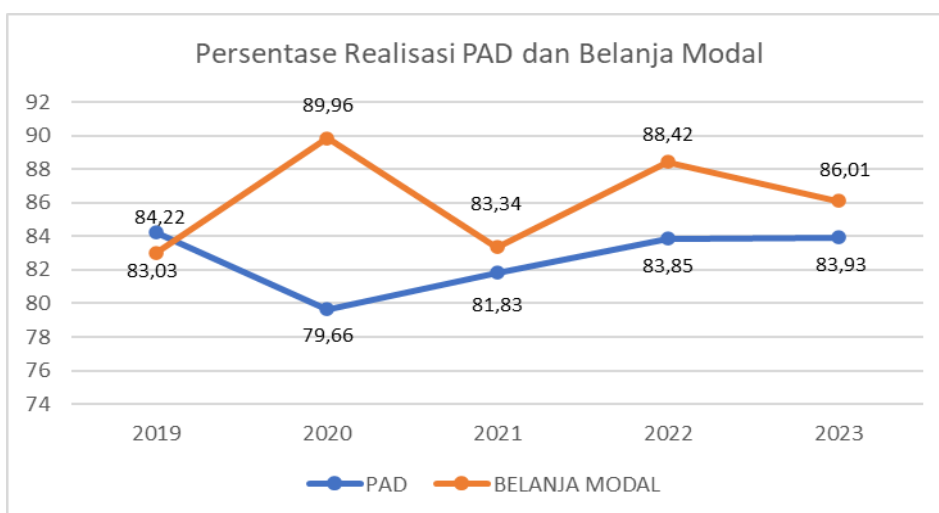
Pemerintah daerah di Indonesia, di era otonomi daerah, memiliki lebih banyak wewenang untuk menggunakan dan mengelola sumber daya, termasuk uang. Sudah menjadi kewajiban instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dalam mendukung kepentingan masyarakat, yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan rencana otonomi daerah berjalan beriringan. Pelayanan publik dan pertumbuhan daerah dipengaruhi oleh efisiensi fiskal yang tercermin dari kinerja keuangan yang baik. Salah satu ukuran utama untuk mengukur manajemen fiskal suatu daerah dan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembangunan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai hasil dari reformasi, pemerintah federal telah menggunakan strategi otonomi untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada setiap daerah atas keuangannya sendiri. Tingkat kemakmuran ekonomi di suatu

daerah merupakan ukuran kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah. (Murti, 2024).

Otonomi daerah hanya dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah pusat jika pemerintah daerah memiliki akses terhadap pendanaan yang memadai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk menggalang dana. Merupakan kewajiban strategis pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran utama otonomi fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan tanpa mengambil uang dari pemerintah federal. Investasi dalam aset tetap daerah, termasuk infrastruktur, adalah tujuan dari belanja modal. Investasi ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di daerah tersebut. Belanja modal adalah dana yang dialokasikan dari anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan kinerja keuangan daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh distribusi belanja modal ini. (Suandani, 2021).

Auditor pihak ketiga akan mengevaluasi keandalan laporan keuangan. Ketika mengevaluasi kesehatan fiskal pemerintah kota, opini audit sangat penting. Opini audit positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi dan dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Indikator penting dari keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak adanya salah saji yang material dan kesesuaian dengan aturan akuntansi pemerintah adalah ciri-ciri opini audit yang positif, seperti WTP. Kepercayaan investor dan pemerintah pusat terhadap kinerja entitas lokal dapat terpengaruh oleh kesimpulan audit ini.

Gambar di bawah ini menunjukkan situasi keseluruhan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dengan tiga indikator: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Opini Audit.



Gambar Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Sumber : Data diolah, BPK RI, 2025

Estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2019-2023, berdasarkan penerimaan aktual, menunjukkan bahwa PAD terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Karena COVID-19 meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2020, terutama di Provinsi Sumatera Selatan, penurunan pada tahun tersebut tidak dapat dihindari. Namun, PAD mulai meningkat secara bertahap pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga tahun 2023. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bapenda Sumatera Selatan menjadi penyebab kenaikan PAD. Denda dan bunga pajak dihapuskan di bawah skema ini, dan untuk mobil-mobil tertentu, biaya BBNKB dipotong hingga setengahnya. Akibatnya, jumlah uang yang terkumpul dari pajak mobil meroket, mencapai rekor tertinggi sebesar Rp94,98 miliar pada Oktober 2021 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, 2020). Semakin sedikit uang yang dibutuhkan daerah dari pemerintah federal, semakin banyak PAD yang membantu APBD. Belanja modal akan terdorong oleh pendapatan daerah yang memadai. Layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, diantisipasi dapat ditingkatkan dengan tingkat investasi modal yang tinggi.

Belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan mengalami naik turun antara tahun 2019 dan 2023. Karena BPP (Belanja Pemerintah Pusat) harus melakukan refocusing pada tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi COVID-19, realisasi belanja modal pada tahun 2021 lebih rendah 6,52% dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena BPP mengalami percepatan realisasi di tahun 2021 sebagai akibat dari melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda di tahun 2020. Berbeda dengan BPP, TKDD memiliki jumlah nominal yang jauh lebih besar penyalurannya di tahun 2020 dibandingkan tahun 2021. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, 2021).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan produk akhir dari pemeriksaan BPK. LHP berisi hasil pemeriksaan serta opini atas LKPD. Tabel berikut ini menampilkan opini atas LKPD Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami penurunan Opini WTP:

**Tabel Opini Audit atas LKPD**

Kabupaten/Kota	OPINI AUDIT		
	2021	2022	2023
Kabupaten Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP
Kabupaten Ogan Ilir	WTP	WDP	WTP
Kota Palembang	WTP	WDP	WTP
Kota Pagar Alam	WTP	WDP	WTP-PSH

**Sumber: BPK R1, 2025**

"Sebanyak 4 daerah di Sumatera Selatan gagal mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2022," BPK RI (2023) menjelaskan, menyiratkan bahwa opini audit turun pada tahun 2022. Keempatnya adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Ilir. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah daerah (Perpres 33 Tahun 2022 dan PP 12 Tahun 2019) merupakan hal yang umum terjadi di beberapa daerah yang mendapat WDP. Selain itu, pengelolaan anggaran daerah juga tidak teratur. Isu atau kasus perjalanan dinas atau peradilan



telah menjerat pemerintah daerah atau OPD. Seiring dengan sarana perjalanan dinas yang direkayasa. Durasi perjalanan dinas, surat tugas, menginap di hotel, dan biaya hotel merupakan sarana yang potensial untuk itu. Korelasi antara perolehan opini audit dan peningkatan kinerja keuangan masih belum jelas mengingat naik turunnya kinerja keuangan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Tanggung jawab mengharuskan adanya rasa memiliki atas hasil dari tindakan administrasi negara. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah mengalami naik turunnya perolehan opini WTP/WDP selama beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan yang lebih dramatis pada opini WTP secara berturut-turut. Hal ini membuat kita bertanya-tanya bagaimana opini audit berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdedikasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, seperti yang terlihat dari peningkatan opini WTP, peningkatan belanja modal, dan PAD.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Teori Keagenan**

Dalam hal mengelola perusahaan, teori keagenan menjelaskan dinamika antara dua peran agen dan prinsipal. Prinsipal dan agen masuk ke dalam hubungan keagenan ketika salah satu pihak setuju untuk menjadikan pihak lain sebagai agen dalam membuat pilihan atas nama prinsipal (Meckling & Jansen, 1976). Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dikelola dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai agen. Untuk memastikan PAD digunakan sesuai dengan kewajiban dan harapan masyarakat, diperlukan pengawasan dari pihak prinsipal (masyarakat). Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bertindak sebagai agen dan prinsipal dengan mengalokasikan investasi modal untuk pembangunan infrastruktur.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya daerah saat ini dapat menghasilkan PAD sebagai sumber pendanaan. PAD yang sah seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset menghasilkan PAD. Kapasitas dan tugas pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja fiskal dapat dipahami dalam kerangka PAD, sebagai hubungan kontraktual antara pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan teori keagenan Jensen dan Meckling (1976).

### **Belanja Modal**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya daerah saat ini dapat menghasilkan PAD sebagai sumber pendanaan. PAD yang sah seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset menghasilkan PAD. Kapasitas dan tugas pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui kinerja fiskal dapat dipahami dalam kerangka PAD, sebagai hubungan kontraktual antara pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan teori keagenan Jensen dan Meckling (1976).

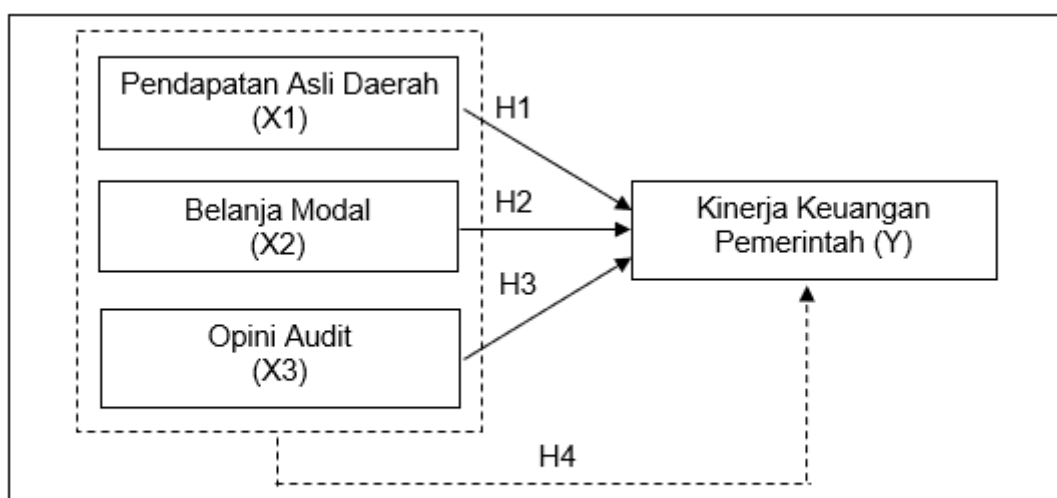
### Opini Audit

Opini auditor merupakan pernyataan tentang keyakinan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan (Abbas, 202). Setelah BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD, atau laporan keuangan pemerintah daerah, mereka memberikan penilaiannya. Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, pemeriksa keuangan wajib memberikan lima opini yang berbeda ketika memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

### Kinerja Keuangan

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dapat dilihat dari sistem manajemen keuangan, yang merupakan perluasan dari visi, tujuan, dan strategi pemerintah. Sistem ini juga mengungkapkan sejauh mana operasi yang dilakukan sejalan dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan (Fatimah Az Zahra, 2024). Pada saat yang sama, Ikhyanuddin (2022) menyatakan bahwa salah satu cara untuk melacak, mengukur, mengevaluasi, dan mencapai penerapan manajemen keuangan daerah adalah melalui kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan belanja modal, akan lebih baik jika kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tepat dan akurat. Ketika pemerintah telah membelanjakan anggarannya secara wajar dan sesuai dengan undang-undang, maka pemerintah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik. (Apridiniyanti, 2019).”

### Kerangka Pemikiran



Gambar Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Peraturan daerah yang diberlakukan sesuai dengan hukum legislatif menjadi dasar untuk pengumpulan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah memiliki dampak yang besar terhadap kapasitas daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di bawah otonomi daerah. Hubungan antara PAD dan keberhasilan keuangan dapat dilihat melalui sudut pandang peran masyarakat sebagai pemilik dan peran pemerintah sebagai agen, sesuai dengan teori keagenan. Masyarakat mendelegasikan tanggung jawab atas administrasi dana daerah, termasuk pendapatan pajak dan bukan pajak dari PAD, kepada pemerintah, yang bertindak sebagai agen atas nama mereka. Sebagai agen, pemerintah bertanggung jawab untuk memanfaatkan PAD dengan baik, termasuk mengalokasikan dana untuk perluasan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif pembangunan lainnya. Namun, konflik keagenan dapat muncul ketika tujuan pemerintah sebagai agen tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal, karena peran pemerintah sebagai agen. Verawaty (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Pengeluaran yang dilakukan oleh rekening kas umum daerah yang menurunkan ekuitas selama periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. Jika pemerintah daerah mampu menciptakan belanja yang efisien, maka kinerjanya baik sesuai dengan anggaran belanja. Namun, jika realisasi belanja lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan, maka hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan anggaran yang buruk. (Nurhalimah, 2024). Menurut teori keagenan, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan hasil keuangan dapat dilihat sebagai kemitraan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam peran sebagai agen dan prinsipal ini, masyarakat mengharapkan pemerintah untuk menggunakan dana yang dimilikinya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya yang akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi adalah penerima alokasi belanja modal. Investasi dalam aset tetap ini akan membantu mendanai pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan daerah jangka panjang. Simamora (2022) membuktikan bahwa berinvestasi dalam infrastruktur fisik dapat meningkatkan keuntungan bagi pemerintah kota.

H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

### **Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Penilaian ahli auditor tentang keandalan laporan keuangan lembaga pemerintah dikenal sebagai opini audit. Jika Anda ingin mengetahui seberapa akuntabel pemerintah, Anda dapat melihat pandangan BPK (Putra, 2022). Masyarakat dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang dapat dipahami melalui teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan antara opini audit dan kinerja keuangan. Setiap orang memiliki peran dalam mengevaluasi dan mengawasi pemerintah daerahnya. Evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah daerah merupakan salah satu dari fungsi tersebut. Memperoleh opini audit yang solid adalah salah satu pendekatannya, karena dokumen ini sangat

penting untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Menurut Putra (2022), rasio efisiensi dipengaruhi oleh opini audit.

H3 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

Dalam hal pendanaan pemerintah daerah dan inisiatif pembangunan, PAD adalah pemain utama. PAD mengacu pada uang yang diperoleh suatu daerah dari hal-hal yang terjadi di dalam wilayahnya sendiri, uang yang diperoleh secara legal. Pemerintah di semua tingkat terkadang melakukan pembelian besar atau proyek konstruksi yang berlangsung lebih dari satu tahun fiskal; pembelian dan proyek konstruksi ini dikenal sebagai belanja modal. Barang, infrastruktur, dan aset lainnya yang digunakan dalam jangka panjang sering kali dianggap sebagai aset tetap. BPK memberikan opini audit ketika menyatakan pandangan profesional tentang keandalan laporan keuangan pemerintah berdasarkan kriteria audit tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mendalilkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan opini audit secara bersamaan.

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

### **C. METODE PENELITIAN**

Para peneliti menganalisis data sekunder dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam investigasi ini. Informasi yang dikumpulkan dari situs web Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ([www.e-ppid.bpk.go.id](http://www.e-ppid.bpk.go.id)) digunakan oleh para peneliti. Data bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemerintah Daerah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Sampling jenuh digunakan dalam penelitian ini. Uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan normalitas digunakan dalam penelitian ini. Metode statistik seperti regresi linier berganda, uji-t dan uji F untuk pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel penelitian ini didefinisikan dan diukur dalam tabel di bawah ini:

**Tabel Definisi Variabel Penelitian dan Pengukuran**

<b>Variabel</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Sumber</b>
Pendapatan Asli Daerah	PAD = (Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah)	UU Nomor 1 Tahun 2002
Belanja Modal	Belanja Modal = (Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya)	UU Nomor 23 Tahun 2014
Opini Audit	Variabel dummy dengan poin 1 untuk opini WTP dan poin 0 untuk opini selain WTP	Rahmah Pertiwi & Haryanto (2022)
Kinerja Keuangan	Rasio Efisiensi $= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$	Halim (2007)



**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

**Tabel Hasil Analisis Deskriptif**

*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	85	24.05	28.00	25.6041	.82935
BM	85	25.58	29.05	26.8245	.58573
OA	85	.00	1.00	.7412	.44059
KK	85	.70	1.22	.9446	.09629
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2025

Berikut ini dapat “ditentukan dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar berbasis statistik deskriptif:

1. Pada tahun 2021, Kabupaten Empat Lawang memperoleh PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan minimal sebesar 24,05. 2. Pada tahun 2023, Kota Palembang menjadi penerima PAD Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki nilai maksimum sebesar 28,00. Jadi, berdasarkan 85 observasi, rata-rata PAD sebesar 25,6041 dan standar deviasi sebesar 0,82935.
2. Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019 mencapai nilai minimum 25,58 pada Belanja Modal (BM) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023, Kota Palembang menjadi penerima belanja modal terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 29,05 juta. Sebanyak 85 belanja modal menghasilkan nilai rata-rata sebesar 26,8245, dengan standar deviasi sebesar 0,58573.
3. variabel OA untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat memiliki nilai antara nol dan satu. Dengan jumlah sampel sebanyak 85 dan standar deviasi sebesar 0,44059, maka rata-rata opini audit adalah 0,7412.
4. Kota Lahat di Provinsi Sumatera Selatan meraih nilai minimal 0,70 persen dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KK) Kabupaten/Kota tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kinerja keuangan terbaik pada tahun 2023, dengan nilai maksimum 1,22. Hasilnya, berdasarkan 85 observasi, rata-rata kinerja keuangan sebesar 0,9446 dan standar deviasi sebesar 0,09629.”

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mengikuti distribusi normal, maka digunakan uji normalitas data. Teknik uji yang digunakan dalam analisis ini memiliki tingkat signifikansi 0,05. (Ghozali, 2018).

### Tabel Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual	
N		85	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.298 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.286
		Upper Bound	.309

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2025

Temuan Monte Carlo Sig. (2-tailed) menunjukkan  $0,298 > 0,05$ , yang sudah umum diketahui. Data mengikuti distribusi normal karena nilai signifikan lebih tinggi dari ambang batas 0,05.

### Uji Multikolinieritas

Jika suatu model regresi memiliki nilai VIP kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10, maka model tersebut dianggap bebas dari multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

#### Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

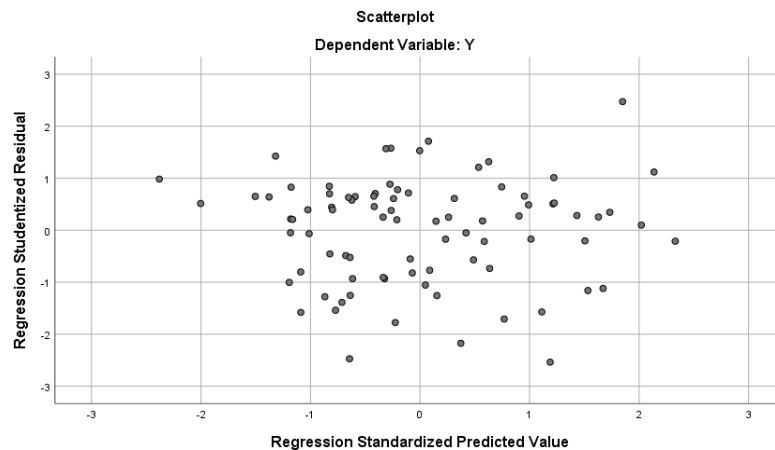
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,615	1,626	Tidak Terjadi Multikolinieritas
BM	0,615	1,626	Tidak Terjadi Multikolinieritas
OA	0,998	1.002	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan dari hasil uji multikolinieritas, dapat disimpulkan nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ , sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Ketika memastikan tidak ada pola yang jelas pada gambar scatterplot, dengan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka uji heteroskedastisitas digunakan. Uji heteroskedastisitas memberikan hasil sebagai berikut:



Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas



Tidak ada “tanda-tanda heteroskedastisitas pada model regresi, seperti yang terlihat pada gambar hasil uji heteroskedastisitas di atas. Kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda heteroskedastisitas karena titik-titik tidak menunjukkan pola tertentu yang jelas serta menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**Uji Autokorelasi**

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan apakah residual dari periode t dan kesalahan dari periode t-1 berkorelasi dalam regresi linier. Suatu model regresi dianggap sangat baik jika tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Uji autokorelasi memberikan” hasil sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 <sup>a</sup>	.449	.428	.024	1.864

a. Predictors: (Constant), PAD, BM, OA

b. Dependent Variable: KK

Sumber : Hasil *Output* SPSS 26, 2025

Dengan 85 sampel observasi dan 3 variabel independen (k = 3), uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,864 pada tingkat signifikansi 5%; dengan demikian, nilai DL adalah 1,5752 dan nilai DU adalah 1,7210. Pada 1,7210, 1,864, dan 2,279, nilai DW berada di dalam kisaran  $DU < DW < 4-DU$ . Temuan-temuan dari pengujian ini mengesampingkan kemungkinan adanya autokorelasi.

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Arah hubungan antara variabel dependen dan independen, serta tingkat hubungan antara beberapa variabel, dapat ditunjukkan dengan analisis regresi. Tabel berikut ini menampilkan hasil analisis regresi linier berganda:

**Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	B
(Constant)	0,258
PAD	-0,008
BM	0,34
OA	-0,30

Sumber : Hasil *Output* SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji diatas, persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 0.258 - 0.008 (PAD) + 0.034 (BM) - 0.030 (OA) + \epsilon$$

Berikut ini “dapat disimpulkan dari persamaan regresi linier berganda:

- a. Nilai variabel kinerja keuangan sebesar 0,258 ketika semua variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Opini Audit (OA) bernilai nol, yang ditunjukkan dengan nilai konstanta (α) sebesar 0,258. Hal ini menunjukkan bagaimana kinerja keuangan.

- b. Koefisien regresi sebesar -0,008 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa, semua hal lain dianggap sama, penurunan 0,08% dalam kinerja keuangan mengikuti kenaikan 1% dalam PAD.
- c. Dengan asumsi semua variabel lain tetap konstan, kenaikan 0,34% pada kinerja keuangan mengikuti kenaikan 1% pada Belanja Modal (BM), sesuai dengan koefisien regresi 0,034 dari variabel ini.
- d. Dengan semua faktor lain dianggap konstan, setiap penurunan 1% dalam Opini Audit (OA) disertai dengan penurunan 0,30% dalam kinerja keuangan (-0,030 adalah koefisien regresi untuk variabel ini). Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.”

### Uji Koefisien Determinasi

Nilai antara nol dan satu diberikan untuk koefisien determinasi. Agar regresi dianggap baik, nilai  $R^2$  harus tinggi atau mendekati 1, yang menunjukkan bahwa variabel independen adalah prediktor yang baik untuk variabel dependen. Lihatlah tabel ini untuk hasil koefisien determinasi:

**Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 <sup>a</sup>	.449	.428	.024

a. Predictors: (Constant), PAD, BM, OA

b. Dependent Variable: KK

Sumber : Hasil *Output* SPSS 26, 2025

Nilai Adjusted R Square adalah 0,428, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD, belanja modal, dan opini audit menjelaskan 42,8% dari varians kinerja keuangan, sedangkan faktor-faktor lain menjelaskan 57,2% sisanya.

### Uji Parsial t

Uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel, tingkat signifikan  $0,05:2 = 0,025$  (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan (df) =  $n-k-1$  atau  $85-3-1 = 81$  diperoleh hasil t-tabel sebesar 1,66388.

**Tabel Hasil Uji Parsial t**

Variabel	t	Sig.
PAD	-2,083	0,040
BM	6.113	0,000
OA	-5.102	0,000

Sumber : Hasil *Output* SPSS 26, 2025

Dengan nilai t-hitung sebesar  $-2,083 < 1,66388$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,040 < 0,05$ , maka secara statistik variabel PAD kurang signifikan, yang mengarah pada penolakan hipotesis pertama (H1). Dengan nilai t-hitung variabel Belanja Modal sebesar  $6,113 > 1,66388$  dan nilai signifikansi lebih kecil yaitu  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Dengan nilai t-hitung sebesar  $-5.102 < 1.66388$  dan nilai signifikansi sebesar  $0.000 > 0.05$  untuk variabel Opini Audit, maka kita dapat menolak hipotesis ketiga (H3).



## Uji Simultan f

**Tabel Hasil Uji Simultan f**

<b>F</b>	<b>Sig.</b>
21.975	0,000 <sup>b</sup>

*Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2025*

Untuk nilai “f-tabel sebesar 2,72, kita dapat melihat bahwa Df1 (jumlah variabel - 1) dan Df2 (n-k-1) sama dengan k = 3, atau 85-3-1 = 81 (di mana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Berdasarkan hasil yang diperoleh dari nilai f-hitung sebesar 21,975 dan nilai signifikan sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa PAD, belanja modal, dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% ( $\alpha = 0,05$ ), dan nilai f-hitung sebesar 21,975 lebih besar dari nilai f-tabel sebesar 2,72.

### Pembahasan

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t (parsial), “nilai t-hitung sebesar -2,083, lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu (-2,083 < 1,66388) dan berdasarkan nilai signifikansi untuk variabel PAD sebesar 0,040 < 0,05 maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Indrawati (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah bermakna bahwa perolehan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah belum optimal sehingga tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.”

#### **Pengaruh Belanja Modal Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t-hitung sebesar 6,113, lebih besar dari t-tabel yaitu (6,113 > 1,66388) dan berdasarkan nilai signifikansi untuk variabel belanja modal sebesar 0,000 < 0,05 maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Simamora (2022) dan Fatimah Az Zahra (2024) yang mengungkapkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian belanja modal yang tepat, pemerintah bertindak sebagai agen dan melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur seperti kesehatan, pendidikan demi kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan.

#### **Pengaruh Opini Audit Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t (parsial) nilai t-hitung sebesar -5,102, lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu (-5,102 < 1,66388) dan berdasarkan nilai signifikansi untuk variabel opini audit sebesar 0,000 < 0,05 maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini selaras dengan penelitian Nurhalimah (2024) yang mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Dalam hal ini peningkatan atau penurunan opini audit yang didapat tidak selalu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. BPK RI memberikan penilaian audit berdasarkan kewajaran dalam laporan keuangan yang berdasarkan SPI, Calk dan pemeriksaan akun-akun. Hal tersebut tidak serta merta berdampak positif kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik atas opini yang telah didapat.”

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan” untuk tahun 2019-2023, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD (X1) dan opini audit (X3) “berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk belanja modal (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. PAD yang meningkat, pengelolaan keuangannya belum tentu efisien atau berdampak terhadap kinerja. Peningkatan belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan aset daerah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja keuangan. Opini audit yang baik (misalnya WTP) tidak selalu mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, karena opini audit lebih menekankan aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan kinerja real anggaran.
2. PAD (X1), belanja modal (X2), dan opini audit (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan efisiensi penggunaan PAD, dengan memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk belanja yang produktif. Dalam hal belanja modal sebaiknya terus ditingkatkan dan diarahkan pada program-program yang bersifat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta untuk opini audit sebaiknya harus diikuti oleh komitmen dalam pengelolaan anggaran secara substansial, bukan sekadar formalitas administrasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel-variabel independen lain, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat mengembangkan objek penelitian berbeda seperti di provinsi lainnya atau dapat menambahkan tahun penelitian.”



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S. (202). *Memahami Ketepatan Pemberian Opini Audit Beserta Faktornya*. Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media.
- Apridiniyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 32-41.
- BPK RI (2019) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera Selatan TA 2019.
- BPK RI. (2020) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera Selatan TA 2020
- BPK RI (2021) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera Selatan T.A 2021
- BPK RI (2022) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera Selatan TA 2022
- BPK RI (2023) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera Selatan TA 2023
- Fatimah Az Zahra, M. R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 369-384.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program IBM SPSS 25. Universitas Diponegoro.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- <https://sumsel.bpk.go.id/2023/08/01/cuma-6-pemda-di-sumatera-selatan-raih-wtp4-turun-jadi-wdp-apa-penyebabnya/>
- Ikhyanuddin, N. N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 64-78.
- Indrawati, N. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen*, 2834-2861.
- Meckling, M. C. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 301-350.
- Murti, E. K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023). e-Proceeding of Management.
- Nurhalimah, M. (2024). Pengaruh Opini Audit BPK dan Belanja Modal Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 78-87.
- Putra, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahLingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2020. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1-13.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2017) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Simamora, W. C. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Uatra Tahun 2018-2020. *Journal of Economics and Business*, 410-415.
- Suandani, K. P. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 728-739.
- Verawaty. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal MBIA*, 21-37.

